



Kota Pontianak Pertahankan Opini WTP

Hasil Audit BPK RI Terhadap LKPD 2012



Walikota, H Sutarmidji SH, MHum, ketika menerima hasil audit dari BPK RI-Anton

PONTIANAK, Komitmen aparaturnya Pemkot dalam melaksanakan prinsip akuntansi pemerintahan akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya, Kota Pontianak kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2013 yang sebelumnya juga disandang tahun 2012 lalu.

Predikat WTP ini merupakan penilaian tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, malah berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tahun 2012. Hasil audit atas laporan keuangan Pemkot ini diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Adi Sudibyo pada Walikota Pontianak, Sutarmidji di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Jumat (31/5).

Menurut Sutarmidji, baru dua daerah yang menerima hasil audit dari BPK yakni Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. "Rapornya sudah saya terima, namun baru diserahkan untuk Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak dimana yang satu WTP dan yang satu WDP," ujarnya.

Kendati penyerahan rapor atau hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum seluruh daerah di Kalbar menerimanya, Sutarmidji berharap, daerah-daerah lainnya juga dapat meraih opini serupa.

"Mudah-mudahan daerah-daerah lainnya

di Kalbar banyak yang meraih predikat WTP karena ini merupakan suatu kebanggaan bagi daerah kita dikenal dengan penilaian tertinggi," kata dia.

Diakuinya, saat ini sudah banyak pemerintah kabupaten/kota yang datang untuk belajar atau studi banding di Kota Pontianak, terkait keberhasilan Pemkot Pontianak meraih predikat opini WTP. Namun Sutarmidji tidak ingin, jajarannya terlena dengan predikat WTP yang diraih dua kali berturut-turut tersebut.

Bahkan dirinya meminta, harus ada perbaikan-perbaikan secara terus-menerus. Karena WTP yang diraih bukan berarti tidak ada temuan, hanya saja temuan itu tidak bersifat fatal dan tidak mengarah pada kerugian negara. "Hanya masalah administrasi, sementara administrasi ini kadang ada ruang-ruang dan aturan namun kita harus tangani dan selesaikan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Adi Sudibyo, menyatakan opini yang diberikan sebagai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan (LK) yang didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

"Berdasarkan kriteria tersebut, BPK RI menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas LK Pemerintah Kota Pontianak dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LK Kabupaten Pontianak," paparnya.

Dijelaskan Adi, dari tujuh kelemahan SPI yang ditemukan BPK RI dalam LK Pemerintah Kota Pontianak, tiga di antaranya adalah penatausahaan persediaan obat dan barang pakai habis pada RSUD Kota Pontianak belum tertib. Termasuk pengelolaan aset tetap Pemkot Pontianak tahun anggaran 2012 belum dilakukan secara memadai, dan perolehan aset dari dana belanja operasional sekolah belum dicatat dalam neraca dan belum diadministrasikan secara memadai.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Drs Hartono Azas LMBA, menyampaikan terima kasih pada Walikota Pontianak yang telah menjalankan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang baik. Sehingga memperoleh opini yang sama dengan tahun yang lalu dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah lainnya.

"Hal-hal yang menjadi pengecualian bagi pemerintah daerah akan menjadi perhatian dan berusaha untuk memperbaikinya segera mungkin. DPRD juga akan selalu menjalankan fungsi pengawasan yang lebih menekankan pada pembinaan dan koordinasi," pungkasnya. (ton)